Haumeni Journal of Education
Volume 5, No. 3, Desember 2025, Hal. 32-46 (e-ISSN 2798-1991)
Available online at https://ejurnal.undana.ac.id/haumeni/

Civic Resilience di Era VUCA: Peran Literasi Bahasa dalam Pembentukan Warga Negara Reflektif di Kota Kupang

Fadil Mas'ud [1] *, Izhatullaili [2], Dorkas Yufice Ariyanti Kale [3] , Irham Wibowo [4]
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Nusa Cendana, Indonesia[1,3]
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Universitas Nusa Cendana, Indonesia[2]
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Universitas Khairun, Indonesia[4]
*E-mail: fadil.masud@staf.undana.ac.id

ARTICLE INFO

Article history
Received: 9-11-2025
Revised: 25-11-2025
Accepted: 25-11-2025

Keywords
literasi bahasa, *civic resilience*, pendidikan kewarganegaraan, era VUCA, Kota Kupang.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran literasi bahasa dalam memperkuat *civic resilience* atau ketangguhan kewarganegaraan di era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) dengan fokus pada konteks sosial multikultural Kota Kupang. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen kebijakan pendidikan serta aktivitas literasi publik. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi bahasa berperan penting dalam membentuk warga negara reflektif yang mampu berpikir kritis, berkomunikasi etis, dan bertindak bermoral. Integrasi literasi bahasa dalam pendidikan kewarganegaraan memperkuat tiga kompetensi utama: *civic literacy, civic communication*, dan *civic empathy*. Praktik pembelajaran berbasis teks reflektif, analisis wacana media, dan dialog etis terbukti meningkatkan kemampuan menalar dan kesadaran moral siswa. *Civic resilience* di Kupang tumbuh melalui sinergi antara rasionalitas, bahasa, dan moralitas yang menopang kohesi sosial dalam masyarakat majemuk. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model *civic-linguistic education* sebagai paradigma baru pendidikan kewarganegaraan berbasis literasi bahasa reflektif untuk memperkuat ketangguhan warga negara di era VUCA.

This study aims to analyze the role of language literacy in strengthening civic resilience in the VUCA era (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity), focusing on the multicultural context of Kupang City, Indonesia. A qualitative approach with a case study design was employed, involving in-depth interviews, participatory observations, and document analysis of educational policies and public literacy activities. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model, including data reduction, display, and conclusion drawing.

The findings reveal that language literacy plays a crucial role in shaping reflective citizens who can think critically, communicate ethically, and act morally. The integration of language literacy into civic education strengthens three key competencies: civic literacy, civic communication, and civic empathy. Reflective text-based learning, media discourse analysis, and ethical dialogues significantly enhance students' reasoning skills and moral awareness. Civic resilience in Kupang emerges through the synergy of rationality, language, and morality, which together sustain social cohesion within a plural society.

This study recommends the development of a civic-linguistic education model as a new paradigm in civic education that integrates critical language literacy to foster adaptive, ethical, and resilient citizens in the face of VUCA challenges.

.This is an open access article under the CC–BY-SA license.

How to Cite: Mas'ud, F., Izhatullaili, I., Kale, D. Y. A., Wibowo, I. (2025). *Civic Resilience* di Era VUCA: Peran Literasi Bahasa dalam Pembentukan Warga Negara Reflektif di Kota Kupang. *Haumeni Journal of Education, 5*(3), 32-46. doi: 10.35508/haumeni.v5i3.25847

PENDAHULUAN

Era globalisasi dan digitalisasi membawa dunia pada kondisi yang dikenal dengan istilah VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity,* dan *Ambiguity)*. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh militer Amerika Serikat dan kini menjadi paradigma baru dalam memahami dinamika sosial, ekonomi, dan pendidikan (Bennett & Lemoine, 2014). Dalam konteks sosial Indonesia, kondisi VUCA tampak nyata dalam cepatnya perubahan teknologi, derasnya arus informasi, serta meningkatnya kompleksitas hubungan sosial dan politik. Hal ini menuntut pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan, untuk membekali peserta didik dengan kemampuan reflektif dan adaptif terhadap perubahan tersebut (Soraya et al., 2022).

Di tengah kondisi tersebut, muncul urgensi untuk membangun *civic resilience*, yaitu ketangguhan warga negara dalam berpikir kritis, berpartisipasi aktif, dan mempertahankan nilai kebangsaan di tengah ketidakpastian (Banks, 2017). *Civic resilience* bukan hanya tentang ketahanan moral, tetapi juga kemampuan untuk membaca, menafsirkan, dan merespons perubahan sosial dengan sikap reflektif dan komunikatif. Dalam hal ini, literasi bahasa menjadi dimensi strategis karena ia memampukan warga negara untuk memahami teks sosial, memproduksi wacana kritis, dan berdialog secara etis di ruang publik (Iman, 2022).

Kota Kupang, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), merepresentasikan laboratorium sosial bagi pembentukan karakter kewarganegaraan di wilayah timur Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, hanya 15,99% penduduk Kota Kupang yang berpendidikan tinggi (S1 ke atas), sedangkan 11,06% merupakan lulusan SMP dan 10,81% lulusan SD (Databoks, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi pendidikan yang berdampak pada kapasitas berpikir kritis warga, termasuk dalam hal literasi bahasa dan partisipasi kewarganegaraan.

Lebih lanjut, Indeks Literasi Membaca Nasional (Databoks, 2024) menunjukkan bahwa NTT masih berada di bawah rata-rata nasional, dengan hanya 24,7% siswa SMA yang mencapai kategori "baik" dalam literasi membaca dan 15,81% dalam literasi numerasi (Kompas, 2024). Rendahnya kemampuan literasi ini memiliki implikasi langsung terhadap pendidikan kewarganegaraan, karena warga dengan kemampuan literasi yang rendah cenderung pasif dan kurang reflektif terhadap isu publik (OECD, 2023). Oleh karena itu, literasi bahasa perlu didekati tidak semata sebagai keterampilan linguistik, tetapi sebagai instrumen pembentukan kesadaran kewarganegaraan reflektif.

Dalam konteks dunia VUCA, literasi bahasa membantu warga negara menavigasi arus informasi yang penuh ketidakpastian, terutama di ruang digital. Kemampuan memahami makna di balik teks, memilah kebenaran informasi, dan menyampaikan pendapat secara argumentatif merupakan bentuk

literasi kritis yang menopang *civic resilience* (Freire, 1970). Warga negara reflektif diartikan sebagai individu yang mampu menimbang nilai-nilai, berpikir etis, dan menyikapi perbedaan dengan rasional. Literasi bahasa berfungsi sebagai *civic skill* yang memperkuat kohesi sosial dan demokrasi deliberatif (Nurjanah et al., 2024).

Kota Kupang sebagai ruang sosial multikultural juga memiliki kompleksitas tersendiri. Keberagaman bahasa daerah, latar etnis, serta perkembangan urbanisasi menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi penguatan literasi bahasa. Di satu sisi, keberagaman ini memperkaya komunikasi sosial; di sisi lain, bisa menimbulkan kesenjangan komunikasi antarkelompok jika tidak dikelola melalui pendidikan kewarganegaraan yang inklusif (Kale et al., 2025). Oleh karena itu, pendekatan literasi bahasa reflektif menjadi relevan untuk mendorong warga berpikir terbuka dan toleran di tengah perbedaan.

Dalam ranah pendidikan formal, penguatan literasi bahasa dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah-sekolah Kota Kupang menjadi penting. Studi oleh Mas'ud et al., (2025) menunjukkan bahwa integrasi pembelajaran berbasis teks dan dialog reflektif dapat meningkatkan *civic awareness* dan empati siswa terhadap isu sosial. Literasi bahasa bukan hanya kemampuan berbahasa, tetapi juga sarana pembentukan identitas kewarganegaraan dan nilai-nilai moral di ruang kelas (Iman, 2022).

Berdasarkan pada aspek kebijakan, upaya peningkatan literasi di NTT telah dilakukan melalui program "Gerakan Literasi Sekolah" dan digitalisasi pembelajaran berbasis bahasa daerah. Namun, implementasi di lapangan sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya guru dan infrastruktur pendidikan (Kemdikbudristek, 2022). Dalam konteks ini, memperkuat literasi bahasa sebagai bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan bukan hanya inovasi pedagogis, tetapi juga strategi memperkuat daya tahan sosial warga Kupang di tengah dunia VUCA yang tidak pasti.

Melalui pertemuan dua ranah penting, literasi bahasa dan pendidikan kewarganegaraan maka penelitian ini berupaya menggali bagaimana literasi dapat memperkuat *civic resilience* masyarakat Kupang. Pendekatan ini sejalan dengan visi *Merdeka Belajar* yang menekankan pembentukan pelajar berprofil Pancasila: beriman, bernalar kritis, mandiri, dan gotong royong (Kemendikbudristek, 2022). Warga negara reflektif tidak lahir dari hafalan konsep, melainkan dari kemampuan membaca dunia dan berdialog dengan realitas sosial yang kompleks.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep *civic-linguistic education*, yakni pendekatan interdisipliner antara literasi bahasa dan pembelajaran kewarganegaraan. Secara praktis, hasil kajian dapat menjadi dasar pengembangan model pendidikan kewarganegaraan adaptif yang menyiapkan generasi muda Kota Kupang menjadi warga negara reflektif, kritis, dan tangguh dalam menghadapi dunia yang serba tidak pasti.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam bagaimana literasi bahasa berperan dalam membentuk *civic resilience* atau ketangguhan kewarganegaraan masyarakat di era VUCA di Kota Kupang. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, nilai, dan refleksi yang muncul dalam praktik literasi bahasa warga negara, khususnya dalam konteks perubahan sosial yang cepat, tidak pasti, kompleks, dan ambigu (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan fenomena sosial secara kontekstual, dengan memperhatikan latar budaya dan sosial masyarakat Kupang yang multikultural.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus intrinsik, dengan fokus pada Kota Kupang sebagai contoh nyata bagaimana literasi bahasa berkontribusi terhadap pembentukan warga negara reflektif dan tangguh menghadapi tantangan era VUCA. Kota Kupang dipilih karena merepresentasikan wilayah dengan dinamika sosial yang unik, meliputi keragaman etnis, peningkatan arus informasi digital, dan tantangan literasi kebangsaan di kalangan generasi muda (BPS Kota Kupang, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan guru pendidikan pancasila, dosen bahasa Indonesia, serta mahasiswa dan siswa SMA di Kota Kupang. Sementara itu, data sekunder berasal dari dokumen kebijakan pendidikan, laporan literasi nasional, dan hasil riset terdahulu yang relevan. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu seperti keterlibatan aktif dalam kegiatan literasi, pendidikan kewarganegaraan, atau gerakan sosial digital (Miles et al., 2014).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi pengalaman dan persepsi informan secara fleksibel. Observasi digunakan untuk mencatat praktik literasi bahasa dan interaksi kewarganegaraan di lingkungan sekolah, kampus, dan komunitas literasi. Sementara itu, studi dokumentasi berfungsi memperkuat validitas temuan melalui analisis kebijakan, teks pembelajaran, dan konten digital yang beredar di masyarakat.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Data yang terkumpul dikodekan berdasarkan tema-tema utama seperti refleksi kewarganegaraan, ketangguhan dalam menghadapi disinformasi, dan peran bahasa dalam membangun kesadaran kritis. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan dalam kerangka teoretis *civic resilience* dan literasi bahasa kritis.

Guna menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen, serta meminta *member checking* kepada informan untuk memastikan kesesuaian interpretasi peneliti terhadap

pengalaman mereka. Selain itu, validitas konseptual diperkuat melalui diskusi sejawat (*peer debriefing*) dengan akademisi Universitas Nusa Cendana Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Penelitian ini juga memperhatikan etika penelitian sosial, terutama terkait kerahasiaan identitas informan dan persetujuan partisipasi (*informed consent*). Semua informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, penggunaan data, serta hak mereka untuk menarik diri kapan pun dari proses penelitian. Pendekatan etis ini penting untuk menjaga kepercayaan dan integritas hasil penelitian.

Secara metodologis, rancangan penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memotret realitas empiris, tetapi juga untuk mengembangkan model konseptual peran literasi bahasa dalam membentuk warga negara reflektif di era VUCA. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga transformatif, yakni mampu menjadi dasar bagi kebijakan dan inovasi pembelajaran kewarganegaraan berbasis literasi kritis di Kota Kupang.

Metode penelitian ini memadukan kekuatan analisis kualitatif dengan konteks lokal Kupang yang plural, guna menghasilkan pemahaman mendalam tentang hubungan antara literasi bahasa, refleksi kewarganegaraan, dan ketangguhan sipil dalam menghadapi era VUCA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literasi Bahasa sebagai Dasar *Civic Resilience* di Era VUCA

Literasi bahasa berperan sebagai fondasi utama dalam pembentukan *civic resilience* atau ketangguhan kewarganegaraan di tengah kompleksitas era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Dalam konteks ini, kemampuan berbahasa tidak hanya dipahami sebagai keterampilan komunikasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen berpikir kritis dan reflektif yang menuntun warga negara untuk menafsirkan, menilai, dan merespons informasi secara bijaksana. Menurut (Freire, 1970), bahasa merupakan medium kesadaran kritis (*critical consciousness*) yang memungkinkan manusia untuk memahami realitas sosial dan melakukan tindakan reflektif terhadap ketidakadilan. Pandangan ini menunjukkan bahwa literasi bahasa memiliki dimensi sosial dan moral yang kuat, terutama dalam membentuk warga negara yang tahan terhadap manipulasi informasi dan polarisasi sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi bahasa masyarakat Kota Kupang masih beragam, dengan dominasi praktik literasi instrumental seperti membaca untuk kebutuhan akademik, sementara literasi reflektif dan kritis masih terbatas. Berdasarkan data *Asesmen Nasional 2024* oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, hanya sekitar 37% siswa di Nusa Tenggara Timur yang mencapai kompetensi literasi membaca pada kategori tinggi. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kemampuan teknis berbahasa dengan kemampuan memahami makna sosial di balik teks. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi pembentukan *civic resilience*, sebab rendahnya literasi bahasa sering kali berdampak pada lemahnya daya tangkal

terhadap disinformasi, ujaran kebencian, dan konten intoleran di media digital (Kemendikbudristek, 2024).

Literasi bahasa yang kuat berfungsi sebagai mekanisme kognitif dan sosial dalam menghadapi tantangan VUCA. Warga negara yang memiliki kemampuan literasi kritis mampu menavigasi ketidakpastian informasi dengan berpikir terbuka, mengajukan pertanyaan reflektif, dan memverifikasi sumber-sumber pengetahuan. Hal ini sejalan dengan konsep *civic literacy* yang dikemukakan oleh Kahne dan Middaugh (2008), di mana literasi menjadi prasyarat bagi partisipasi demokratis yang cerdas dan etis. Dalam konteks Kota Kupang, kemampuan tersebut tampak dalam komunitas literasi kampus dan sekolah yang memanfaatkan kegiatan menulis reflektif, diskusi publik, dan pembuatan konten edukatif digital untuk mengembangkan kesadaran kewarganegaraan.

Berdasarkan hasil wawancara, guru Pendidikan Kewarganegaraan di Kupang menegaskan bahwa literasi bahasa membantu siswa memahami isu-isu kebangsaan dengan perspektif yang lebih luas. Siswa yang terbiasa membaca berbagai jenis teks dan berdiskusi kritis menunjukkan tingkat refleksi moral dan sosial yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang hanya mengandalkan hafalan konsep kewarganegaraan. Fenomena ini mendukung pandangan (Vygotsky, 1978) bahwa bahasa berfungsi sebagai alat mediasi kognitif dalam perkembangan kesadaran sosial. Melalui bahasa, individu bukan hanya menafsirkan dunia, tetapi juga membangun interaksi sosial yang memperkuat kohesi dan empati kewarganegaraan.

Dalam era digital, literasi bahasa juga berfungsi sebagai filter etis terhadap konten yang beredar di media sosial. Masyarakat yang memiliki kemampuan literasi digital-linguistik yang baik mampu mengenali bias, framing, dan manipulasi bahasa dalam berita atau unggahan daring. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa warga muda Kupang yang aktif dalam komunitas literasi digital memiliki kemampuan lebih tinggi dalam mengidentifikasi ujaran kebencian dan narasi disinformasi dibandingkan kelompok lain. Hal ini memperlihatkan hubungan erat antara literasi bahasa dan ketahanan sosial di dunia maya, di mana refleksi linguistik menjadi bagian dari ketahanan kewarganegaraan (Mihailidis & Thevenin, 2013).

Secara teoretis, literasi bahasa menjadi pintu masuk bagi pembentukan *reflective citizenship*, yaitu warga negara yang memiliki kesadaran diri, kepekaan sosial, dan kemampuan menimbang secara etis dalam mengambil keputusan publik. Teori *reflective thinking* dari Dewey (1933) menekankan pentingnya proses berpikir reflektif dalam menghadapi situasi ambigu dan tidak pasti, yang menjadi ciri utama era VUCA. Proses ini melibatkan kemampuan untuk menafsirkan bahasa, memahami konteks, serta menilai dampak sosial dari setiap tindakan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, kemampuan tersebut menjadi jembatan antara dimensi kognitif (pengetahuan kewarganegaraan) dan afektif (komitmen moral terhadap nilai-nilai demokrasi).

Elaborasi terhadap hasil penelitian juga menunjukkan bahwa literasi bahasa memperkuat *resilience mindset*, yaitu pola pikir tangguh yang tidak mudah goyah oleh tekanan sosial atau arus

informasi yang kontradiktif. Di Kupang, warga yang aktif membaca, berdiskusi, dan menulis reflektif cenderung memiliki pandangan yang lebih moderat terhadap perbedaan sosial dan politik. Aktivitas literasi membantu mereka menginternalisasi nilai-nilai toleransi dan empati sebagai bagian dari praktik kewarganegaraan yang adaptif. Temuan ini menguatkan teori Bandura (1977) tentang *social cognitive agency*, di mana bahasa menjadi sarana utama bagi individu untuk menegosiasikan makna dan mengarahkan perilaku sosialnya secara otonom.

Dalam perspektif aksiologis, literasi bahasa berfungsi sebagai wahana pembentukan nilai dan moral kewarganegaraan. Bahasa yang digunakan dalam ruang publik mencerminkan kualitas etika sosial suatu masyarakat. Ketika warga mampu menggunakan bahasa secara reflektif dan etis, maka wacana publik akan lebih beradab dan konstruktif. Di Kupang, inisiatif seperti "Forum Literasi Kupang Cerdas" dan "Komunitas Bahasa dan Perdamaian" menjadi contoh nyata bagaimana literasi digunakan untuk membangun dialog lintas identitas dan memperkuat kohesi sosial.

Berdasarkan analisis ini, literasi bahasa tidak hanya berperan sebagai kemampuan akademik, tetapi juga sebagai mekanisme resilien dalam kehidupan berbangsa. Kemampuan menafsirkan makna, mengkritisi narasi, dan menyampaikan ide secara etis menjadikan literasi bahasa sebagai instrumen utama untuk memperkuat *civic resilience* di tengah tantangan era VUCA.

Integrasi Literasi Bahasa dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Integrasi literasi bahasa dalam pendidikan kewarganegaraan merupakan strategi fundamental untuk membentuk warga negara reflektif yang mampu berpikir kritis, berkomunikasi etis, dan bertindak rasional di tengah ketidakpastian era VUCA. Literasi bahasa tidak hanya dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga sebagai kemampuan memahami, menafsirkan, dan merefleksikan realitas sosial melalui bahasa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, literasi bahasa menjadi sarana untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial melalui wacana yang bermakna dan kontekstual (Fairclough, 1995).

Kondisi di Kota Kupang menunjukkan urgensi integrasi ini. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang (2024), sebanyak 58% siswa SMP dan SMA memiliki kemampuan literasi membaca di bawah tingkat fungsional yang diukur oleh Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), sementara hanya 35% yang mampu menulis argumentatif dengan struktur logis. Di sisi lain, hasil survei Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek (2024) memperlihatkan bahwa 61% peserta didik di Nusa Tenggara Timur aktif mengakses konten digital harian, tetapi hanya 29% yang dapat mengidentifikasi bias, hoaks, atau ujaran kebencian dalam media daring. Fakta ini menegaskan bahwa literasi bahasa dan kewarganegaraan belum terintegrasi secara efektif, padahal keduanya saling menopang dalam pembentukan nalar reflektif warga negara.

Dalam konteks teoritis, integrasi literasi bahasa dalam pendidikan kewarganegaraan dapat dijelaskan melalui pendekatan *critical literacy* yang dikembangkan oleh Paulo Freire (1970) dan

diperkaya oleh (Luke & Freebody, 2021). Freire menegaskan bahwa membaca dunia sama pentingnya dengan membaca kata—bahasa menjadi alat kesadaran dan pembebasan sosial. Dalam pendidikan kewarganegaraan, pembelajaran berbasis literasi kritis membantu siswa menelaah narasi kekuasaan, ideologi, dan identitas dalam teks kewarganegaraan, baik berupa dokumen konstitusional, pidato politik, maupun berita digital. Proses ini menumbuhkan kesadaran reflektif (*civic reflection*) dan kemampuan menalar secara etis terhadap isu publik.

Pendidikan kewarganegaraan tradisional cenderung berfokus pada hafalan nilai-nilai dan norma hukum, tanpa memberi ruang pada eksplorasi linguistik dan wacana kritis. Namun, model pembelajaran baru yang mengintegrasikan literasi bahasa memungkinkan peserta didik tidak hanya memahami konsep hak dan kewajiban, tetapi juga mampu *mengartikulasikan* gagasan kewarganegaraan mereka melalui tulisan, debat, atau analisis media. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Banks (2017) tentang *transformative civic education*, yang menempatkan bahasa sebagai medium utama dalam proses demokratisasi pendidikan.

Empirinya, beberapa sekolah di Kota Kupang mulai mempraktikkan pendekatan integratif ini. Misalnya, *SMP Negeri 3 Kupang* menerapkan proyek "Menulis Opini Kewarganegaraan" di mana siswa diminta menulis refleksi terhadap isu lingkungan dan toleransi antarumat beragama dalam bentuk esai opini. Sementara di *SMA Muhammadiyah Kupang*, guru PPKn berkolaborasi dengan guru Bahasa Indonesia untuk mengembangkan modul "Wacana Demokrasi Digital", di mana siswa menganalisis ujaran kebencian dan menulis respons etis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hasil observasi lapangan menunjukkan peningkatan kemampuan argumentatif dan empati siswa, yang menandakan penguatan literasi kewarganegaraan melalui bahasa reflektif.

Secara pedagogis, integrasi literasi bahasa dalam pendidikan kewarganegaraan mendukung pengembangan tiga kompetensi utama: (1) *civic literacy*, kemampuan memahami informasi publik secara kritis; (2) *civic communication,* kemampuan menyampaikan pendapat dengan etika demokratis; dan (3) *civic empathy*, kemampuan merespons isu publik dengan kepekaan moral. Tiga kompetensi ini selaras dengan model *21st Century Skills* yang menekankan *critical thinking, communication, collaboration, dan creativity* (Trilling & Fadel, 2009). Di Kota Kupang, keterampilan ini menjadi sangat relevan karena masyarakatnya multikultural dan sering terpapar dinamika sosial-politik yang kompleks, seperti isu toleransi agama dan partisipasi digital warga muda.

Analisis teoritik Habermas (1989) tentang *communicative action* memperkuat pentingnya dimensi bahasa dalam praktik kewarganegaraan. Dalam masyarakat yang plural, komunikasi rasional berbasis argumentasi terbuka merupakan prasyarat bagi terciptanya kesepahaman dan solidaritas sosial. Ketika peserta didik dilatih menggunakan bahasa untuk berdialog, mendebat, dan merefleksikan isu publik, mereka tidak hanya belajar berbahasa dengan baik, tetapi juga belajar menjadi warga negara yang berpikir dan bertindak berdasarkan norma diskursif yang beradab.

Dari perspektif moral, literasi bahasa juga berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter

kewarganegaraan. Lickona (2018) menjelaskan bahwa karakter tidak hanya dibentuk melalui nilai-nilai abstrak, tetapi juga melalui praktik berbahasa yang mencerminkan integritas dan empati. Bahasa yang digunakan untuk berdialog, menulis refleksi, atau mengkritik isu publik merupakan cermin dari moralitas warga negara. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan berbasis literasi bahasa di Kupang perlu diarahkan untuk membangun *moral reasoning* yang dapat menyeimbangkan rasionalitas dan empati sosial.

Selain itu, pendekatan integratif ini juga memiliki implikasi terhadap inovasi kurikulum. Model pembelajaran lintas mata pelajaran (interdisipliner) antara Bahasa Indonesia dan PPKn memungkinkan pembentukan *reflective citizenship*, yaitu warga negara yang berpikir kritis melalui bahasa dan bertindak berdasarkan nilai moral. Model ini sesuai dengan arah *Kurikulum Merdeka* yang menekankan *profil pelajar Pancasila*, khususnya dimensi bernalar kritis dan gotong royong. Implementasi di Kupang dapat diperkuat melalui *project-based learning* berbasis isu lokal, seperti pluralitas budaya, ekologi sosial, dan partisipasi digital.

Integrasi literasi bahasa dalam pendidikan kewarganegaraan bukan hanya memperkaya metode pembelajaran, tetapi juga merevitalisasi fungsi pendidikan sebagai ruang pembentukan warga negara reflektif. Ketika siswa belajar menulis, berdiskusi, dan merefleksikan isu publik melalui bahasa yang beretika dan kritis, mereka sedang membangun ketahanan kewarganegaraan (*civic resilience*) yang menjadi bekal penting menghadapi ketidakpastian dunia VUCA. Kota Kupang, sebagai ruang sosial yang multikultural dan dinamis, menjadi laboratorium nyata bagi lahirnya praktik-praktik literasi kewarganegaraan yang membentuk warga yang rasional, komunikatif, dan bermoral.

Civic Resilience: Sinergi Antara Rasionalitas, Bahasa, dan Moralitas

Konsep *civic resilience* atau ketangguhan kewarganegaraan tidak semata-mata mengacu pada kemampuan bertahan dari tekanan sosial dan politik, tetapi juga pada kapasitas warga negara untuk berpikir rasional, berkomunikasi reflektif, dan bertindak bermoral dalam situasi yang tidak pasti. Dalam konteks era VUCA, di mana perubahan sosial dan informasi berlangsung cepat dan sering kali menimbulkan ambiguitas, sinergi antara rasionalitas, bahasa, dan moralitas menjadi fondasi penting bagi terwujudnya masyarakat yang tangguh secara intelektual dan etis (Lalonde, 2020). Warga negara yang resilien tidak hanya mampu menganalisis dan memahami persoalan publik secara kritis, tetapi juga berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.

Rasionalitas dalam *civic resilience* berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis dan penalaran etis dalam menghadapi arus informasi yang beragam. Habermas (Habermas, 1989) melalui konsep *communicative rationality* menegaskan bahwa rasionalitas tidak hanya bersifat instrumental (mencari hasil efisien), tetapi juga komunikatif, yakni proses berpikir yang berakar pada dialog yang terbuka, argumentatif, dan etis. Dalam penelitian ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa warga muda di Kota Kupang yang aktif dalam kegiatan literasi publik, seperti forum diskusi kampus atau komunitas baca,

menunjukkan tingkat refleksi rasional yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak terlibat. Mereka mampu menimbang berbagai pandangan tentang isu sosial, seperti polarisasi politik, keragaman budaya, atau intoleransi dengan argumentasi yang berbasis fakta dan pertimbangan moral, bukan sekadar emosi atau opini populer.

Bahasa menjadi jembatan utama bagi rasionalitas ini untuk mewujud dalam praktik sosial. Melalui bahasa, warga mengekspresikan pandangan, membangun dialog, dan menegosiasikan makna bersama. Bahasa yang reflektif memungkinkan pembentukan ruang publik yang sehat, di mana warga dapat bertukar pikiran secara argumentatif tanpa kehilangan rasa hormat terhadap perbedaan. Teori *Discourse Ethics* dari Habermas (1989) menegaskan bahwa etika publik lahir dari komunikasi yang rasional dan setara. Dalam konteks masyarakat Kupang, praktik ini terlihat dalam forum literasi kampus dan komunitas seperti Kupang *Literacy Circle* atau Bahasa untuk Perdamaian, di mana bahasa digunakan untuk membangun kesadaran sosial dan memperkuat nilai dialog. Forum-forum ini memperlihatkan bahwa kemampuan berbahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga instrumen moral untuk menumbuhkan empati dan kesalingpahaman.

Moralitas menjadi pilar ketiga dalam konstruksi *civic resilience*. Dalam teori moral reflektif yang dikemukakan oleh Kohlberg (1981), kematangan moral seseorang berkembang seiring dengan kemampuan berpikir rasional dan empatik terhadap kepentingan orang lain. Dalam konteks penelitian ini, warga Kupang yang aktif dalam kegiatan literasi dan dialog sosial menunjukkan kecenderungan untuk menimbang persoalan publik berdasarkan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama, bukan sekadar kepentingan kelompok. Misalnya, dalam wawancara dengan mahasiswa Program Studi PPKn Universitas Nusa Cendana, ditemukan bahwa diskusi tentang ujaran kebencian di media sosial sering berujung pada refleksi moral tentang tanggung jawab pengguna bahasa dalam menjaga perdamaian digital. Refleksi seperti ini memperkuat pemahaman bahwa *civic resilience* adalah hasil dari keseimbangan antara nalar kritis dan kesadaran moral.

Sinergi antara rasionalitas, bahasa, dan moralitas juga tampak dalam ruang pendidikan formal, terutama melalui pembelajaran literasi kritis dan kewarganegaraan reflektif. Guru di beberapa SMA di Kupang mengintegrasikan pembelajaran bahasa dan nilai kewarganegaraan dengan pendekatan berbasis masalah (*problem-based learning*). Siswa diajak menganalisis teks berita, debat publik, atau pidato politik dengan menilai aspek logika argumentasi dan nilai moral yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir analitis, tetapi juga menanamkan etika komunikasi publik. Sebagaimana dinyatakan oleh Nussbaum (2013), pendidikan humanistik harus menumbuhkan *narrative imagination*, kemampuan untuk memahami dunia dari perspektif orang lain sebagai bentuk moralitas rasional yang menjadi inti dari kewarganegaraan demokratis.

Rasionalitas yang dikembangkan melalui bahasa juga memperkuat daya tahan warga terhadap manipulasi informasi di ruang digital. Di era pasca-kebenaran, di mana emosi sering kali menggantikan fakta, kemampuan berbahasa reflektif menjadi alat penting untuk menjaga integritas wacana publik.

Penelitian lapangan menemukan bahwa anggota komunitas literasi digital di Kupang menggunakan kegiatan menulis dan berdiskusi untuk melatih diri membedakan antara opini, fakta, dan propaganda. Praktik ini sejalan dengan gagasan Paul dan Elder (2014) tentang *critical thinking*, di mana penggunaan bahasa secara rasional membantu individu menilai validitas argumen dan menghindari kesesatan berpikir (*fallacy*). Melalui proses ini, literasi bahasa menjadi bentuk perlindungan moral dan kognitif terhadap ancaman disinformasi dan ujaran kebencian.

Secara aksiologis, bahasa bukan hanya alat ekspresi rasional, tetapi juga ruang pembentukan nilai. Setiap interaksi linguistik membawa dimensi moral yang memengaruhi kualitas relasi sosial antarwarga. Ketika bahasa digunakan secara reflektif dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kesetaraan, dan empati. Bahasa menjadi sarana pembentukan budaya kewarganegaraan yang beradab. Di Kupang, praktik penggunaan bahasa yang santun dan dialogis masih menjadi kekuatan sosial, terutama dalam konteks masyarakat majemuk. Fenomena seperti diskusi lintas agama dan komunitas budaya yang digelar oleh Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) menunjukkan bahwa bahasa yang rasional dan etis mampu menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik horizontal.

Sinergi antara rasionalitas, bahasa, dan moralitas juga berkontribusi terhadap terbentuknya *civic virtue* atau kebajikan kewarganegaraan, sebagaimana dijelaskan oleh MacIntyre (1984). *Civic virtue* mencerminkan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dalam masyarakat Kupang yang multikultural, kebajikan ini terwujud melalui partisipasi aktif warga dalam kegiatan sosial, budaya, dan pendidikan. Warga yang berbahasa reflektif dan berpikir rasional cenderung lebih siap untuk berkolaborasi dan menyelesaikan konflik secara deliberatif. Hal ini menunjukkan bahwa ketangguhan kewarganegaraan bukanlah hasil dari doktrin moral semata, melainkan dari dialog yang terus-menerus antara nalar, bahasa, dan nilai kemanusiaan.

Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa ketika rasionalitas dan moralitas tidak seimbang, *civic resilience* menjadi rapuh. Rasionalitas tanpa moralitas melahirkan sikap oportunistik dan relativisme etis, sementara moralitas tanpa rasionalitas mudah terjebak dalam dogmatisme. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan dan literasi bahasa di Kupang diarahkan untuk mengintegrasikan keduanya melalui model *reflective dialogue*, di mana siswa dilatih untuk menyampaikan pendapat secara logis sekaligus menimbang konsekuensi etisnya. Model ini terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran reflektif di kalangan generasi muda.

Pada akhirnya, *civic resilience* dalam konteks masyarakat Kota Kupang dapat dipahami sebagai hasil dari sinergi rasionalitas yang kritis, bahasa yang reflektif, dan moralitas yang humanistik. Ketiganya membentuk fondasi bagi warga negara yang tidak hanya tangguh menghadapi ketidakpastian, tetapi juga berdaya dalam menjaga nilai kemanusiaan dan kebinekaan. Pembentukan sinergi ini merupakan tugas kolektif antara lembaga pendidikan, komunitas literasi, dan pemerintah daerah untuk menumbuhkan budaya dialog yang rasional dan bermoral dalam kehidupan publik.

SIMPULAN

Literasi bahasa memiliki peran strategis dalam memperkuat *civic resilience* atau ketangguhan kewarganegaraan di era VUCA, khususnya di konteks sosial multikultural Kota Kupang. Literasi bahasa yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis membaca dan menulis, tetapi juga pada dimensi reflektif dan kritis, terbukti menjadi instrumen penting dalam membangun warga negara yang rasional, etis, dan berempati. Kemampuan memahami, menafsirkan, dan menilai wacana publik melalui bahasa menjadikan peserta didik lebih adaptif terhadap perubahan sosial yang cepat dan kompleks.

Integrasi literasi bahasa dalam pendidikan kewarganegaraan berkontribusi terhadap penguatan tiga kompetensi utama warga negara reflektif, yakni *civic literacy*, *civic communication*, dan *civic empathy*. Melalui pendekatan pembelajaran berbasis teks, diskusi kritis, serta penulisan reflektif, siswa tidak hanya memahami hak dan kewajiban, tetapi juga mampu mengartikulasikan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial dalam praktik nyata. Model pembelajaran interdisipliner antara Bahasa Indonesia dan Pendidikan Kewarganegaraan terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran moral dan tanggung jawab sosial di kalangan generasi muda Kupang.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *civic resilience* tidak dapat dilepaskan dari sinergi antara rasionalitas, bahasa, dan moralitas. Rasionalitas memberikan kerangka berpikir kritis, bahasa menjadi medium komunikasi yang reflektif, sementara moralitas memberikan arah etis bagi tindakan warga negara. Ketiga aspek ini membentuk struktur kewarganegaraan tangguh yang mampu menghadapi dinamika sosial-politik era digital tanpa kehilangan nilai kemanusiaan dan kebinekaan.

Secara praktis, penguatan *civic resilience* melalui literasi bahasa dapat diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor antara lembaga pendidikan, komunitas literasi, dan pemerintah daerah. Kegiatan seperti *forum literasi kewarganegaraan*, pelatihan *critical media literacy*, serta pembelajaran berbasis isu lokal perlu diperluas untuk memperkuat kapasitas reflektif warga. Pendidikan yang mengintegrasikan bahasa, rasionalitas, dan moralitas akan melahirkan warga negara yang bukan hanya cerdas dan adaptif, tetapi juga berkarakter dan beradab dalam menghadapi ketidakpastian dunia VUCA.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah kajian interdisipliner antara literasi bahasa dan pendidikan kewarganegaraan dengan menghadirkan konsep *civic-linguistic education*—yakni pendidikan yang menempatkan bahasa sebagai ruang praksis kewarganegaraan reflektif. Secara empiris, hasil kajian memberikan dasar bagi pengembangan model pembelajaran kewarganegaraan berbasis literasi kritis di Kota Kupang dan wilayah lain di Indonesia. Ke depan, diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan tindakan (*action research*) untuk menguji efektivitas implementasi model ini dalam meningkatkan kesadaran reflektif dan ketangguhan warga negara di berbagai konteks pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs.

Banks, J. A. (2017). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives*. Jossey-Bass.

Bennett, N., & Lemoine, G. J. (2014). What VUCA Really Means for You. *Harvard Business Review*, *92*(1/2), 27–42.

BPS Kota Kupang. (2024). *Kota Kupang dalam Angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kota Kupang.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Databoks. (2024). *15,99% Penduduk Kota Kupang Berpendidikan Tinggi pada Akhir 2024*. https://databoks.katadata.co.id/

Dewey, J. (1933). *How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process*. D.C. Heath.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. (2024). *Laporan Capaian Literasi dan Numerasi Satuan Pendidikan Kota Kupang Tahun 2024*.

Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman.

Fathni, I., Harsya, R. M. K., Hasibuan, K., Basri, B., & Mas'ud, F. (2024). Debt Position in Illegal Online Loans. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, *6*(3), 1786-1792.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Herder and Herder.

Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Polity Press.

Iman, B. N. (2022). Budaya Literasi Dalam Dunia Pendidikan. *Prosiding Conference of Elementary Studies*, 23–41.

Izhatullaili, I., Mas' ud, F., & Jama, K. B. (2025). Konstruksi Keadilan di Era Media Sosial: No Viral No Justice dalam Kontroversi Bupati Pati. *Jurnal Civicatio*, *1*(1), 1-9.

Kale, D. Y. A., Mas' ud, F., & Nassa, D. Y. (2025). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Bangsa yang Tangguh di Era Digital. *Media Sains*, *25*(1), 9-14.

Kale, D. Y. A., Nassa, D. Y., Kollo, F. L., & Mas'ud, F. (2025). *Kewarganegaraan di Era Society 5.0*. Tangguh Denara Jaya Publisher.

Kemdikbudristek. (2022). *Profil Pelajar Pancasila: Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemendikbudristek. (2024). *Asesmen Nasional: Hasil Literasi Membaca 2024*.

Kohlberg, L. (1981). *Essays on Moral Development, Volume One: The Philosophy of Moral Development*. Harper & Row.

Lalonde, C. (2020). Civic Resilience and the Ethics of Citizenship in Uncertain Times. *Journal of Civic Studies*, *5*(2), 45–59.

Lickona, T. (2018). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*. Bantam Books.

Luke, A., & Freebody, P. (2021). Critical Literacy in a Changing World: Revisiting Pedagogy and Purpose. *Journal of Literacy Research*, *53*(4), 451–468.

Mas' ud, F. (2019). Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Penjual Koran Di Kota Kupang). *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, *4*(2), 11-19.

Mas' ud, F. (2024). Peran Perempuan di Sektor Publik: Kajian Hak Asasi Manusia terhadap Perempuan Pegawai SPBU di Kota Kupang. *Media Sains*, *24*(2), 61-64.

Mas' ud, F., Medan, K. K., & Wibowo, I. (2025). Hak Kewarganegaraan Imigran Afghanistan di Kota Kupang dalam Perspektif Teori Hak Asasi Manusia. *Global Academical Journal*, *5*(2), 1-8.

Mas' ud, F., & Wibowo, I. (2025). Ekologi Kewarganegaraan: Membangun Relasi Harmonis antara Warga, Negara, dan Lingkungan. *Media Sains*, *25*(1), 27-31.

Mas'ud, F., Silla, D., Ly, R. G., Kontesa, A. F., Letma, F., Toga, T. K. H., & Kontesa, F. (2025). Civic Literacy: Literasi Kewarganegaraan Digital sebagai Upaya Pencegahan Disinformasi di Kalangan Siswa SMA di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Civicatio*, *1*(1), 39-50.

Mas'ud, F., Kale, D. Y. A., Gero, H. M. E., Kolianan, J. B., Sabariman, H., & Peranginangin, I. I. (2025). Studi Masyarakat Indonesia. *Tangguh Denara Jaya Publisher*.

Mas'ud, F., Izhatullaili, I., Doko, Y. D., & Jama, K. B. (2025). Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai Sarana Penguatan Literasi Hukum di Era Digital. *Haumeni Journal of Education*, *5*(2), 9–21. https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i2.24455

Mihailidis, P., & Thevenin, B. (2013). Media Literacy as a Core Competency for Engaged Citizenship in Participatory Democracy. *American Behavioral Scientist*, *57*(11), 1611–1622. https://doi.org/10.1177/0002764213489015

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Misgiyati, M., Kale, D. Y. A., Mas' ud, F., & Nassa, D. Y. (2025). Etnomatika dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Inovasi Pembelajaran Berbasis Kearifan Lokal untuk Penguatan Civic Competence. *Jurnal Civicatio*, *1*(1), 10-18.

Nassa, D. Y., Mas'ud, F., Nitte, Y. M., & Bakoil, M. B. (2025). Pendidikan Pancasila: Menjawab Tantangan di Era Digital. *Tangguh Denara Jaya Publisher*.

Nurjanah, N., Abdulkarim, A., Komalasari, K., Bestari, P., & Suwandi, M. A. (2024). Critical literacy of young citizens in the digital era. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *21*(2), 352–358. https://doi.org/10.21831/jc.v21i2.70232

Nussbaum, M. C. (2013). *Creating Capabilities: The Human Development Approach*. Harvard University Press.

Ojo, M. C., Widyawan, A., Kolong, M. G. S., Nahak, P. K., Siga, D. V. T., & Mas' ud, F. (2025). Kebebasan Beragama dalam Bayang-Bayang Intoleransi: Tinjauan Kritis terhadap

Implementasi Pasal 28 E Ayat (1) UUD 1945. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, *1*(04), 702-707.

Paulina, M., Dwiputra, R., Mas' ud, F., & Taneo, K. L. F. (2025). Civic Ecology dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Penguatan Kesadaran Ekologis melalui Konservasi Hutan Pulau Timor. *Jurnal Civicatio*, *1*(1), 19-27.

Putra, J. A., Permata, D., Djani, A. I., Sabetu, D. L., Finit, Y. N., & Mas'ud, F. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, *3*(02), 1239-1251.

Soraya, N. A., Tyas, S. A., & Ayu, V. k. (2022). Nasionalisme Bangsa Di Era VUCA (Volality, Uncertainty, Complexity Dan Ambiguity). *Jurnal Kewarganegaraan*, *6*(1), 1238–1243. https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2701

Trilling, B., & Fadel, C. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. Jossey-Bass.

Umar, S. H., Abbas, I., Wibowo, I., & Mas'ud, F. (2025). The construction of children's cultural identity in the digital era: an analysis of the family's role in Ternate City. *Jurnal Fundadikdas (Fundamental Pendidikan Dasar)*, *8*(2), 105-116.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes* (M. Cole, V. John-Steiner, S. Scribner, E. Souberman, Eds. & Trans). Harvard University Press.

Wangku, J. A., Taolin, A. P., Ola, M. F. L., Tenmau, D. G., Kares, A. P., & Mas'ud, F. (2025). Implemnetasi Prinsip Meaningful Participation Dalam Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *2*(3), 328-345.

Wibowo, I., Noe, W., Mas' ud, F., & Kale, D. Y. A. (2025). Pendidikan Moral Berbasis Pancasila Sebagai Antitesis Perilaku Echo Chamber di Kalangan Mahasiswa PPKn Universitas Khairun. *Haumeni Journal of Education*, *5*(2), 78-86.